



KEPALA DESA MARGAMULYA
KECAMATAN KEDUNGBANTENG KABUPATEN TEGAL

PERATURAN DESA MARGAMULYA
NOMOR 02 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MARGAMULYA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MARGAMULYA

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomo 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Trasmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor ..);
18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 145/2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 146/2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
20. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 01);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015

Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4);

22. Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Penghasilan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 52); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Penghasilan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 8);
23. Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 75);
24. Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2017 Nomor 23);
25. Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 24);
26. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2018 tentang Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 80);
27. Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Desa, yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Desa (Berita Daerah Kabupatehn Tegal Tahun 2021 Nomor 24);
28. Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 23);
29. Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 12);
30. Peraturan Bupati Tegal No. 05 Atas Perubahan Peraturan No. 71 Tahun 2020 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor 05);
31. Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan Serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2023 Nomor ..);
32. Peraturan Bupati Tegal Nomor 83 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Penetapan Lokasi Serta Besaran Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2024 (Berita Daerah Kab. Tegal Tahun 2023 Nomor . .);

33. Peraturan Bupati Tegal Nomor 115 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBdesa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor 115);
34. Peraturan Bupati Tegal Nomor 118 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Desa di Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor 118.);
35. Surat Bupati Tegal Nomor : 400/0101/B.1413/2022 Tanggal 5 Desember 2022 Perihal Pelaksanaan Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan di Desa;
36. Peraturan Desa Margamulya Nomor 01 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Margamulya Kecamatan Kedungbanteng Kab. Tegal (Lembaran Desa Margamulya Tahun 2017 Nomor 01);
37. Peraturan Desa Margamulya Nomor 05 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di desa Margamulya (Lembaran Desa Margamulya Tahun 2020 Nomor 05);
38. Peraturan Desa Margamulya Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pilkades Desa Margamulya (Lembaran Desa Margamulya Tahun 2019 Nomor 01).
39. Peraturan Desa Margamulya Nomor 05 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2020-2025 Desa Margamulya Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal (Lembaran Desa Margamulya Tahun 2019 Nomor 05);
40. Peraturan Desa Margamulya Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Asset Desa Margamulya (Lembaran Desa Margamulya Tahun 2019 Nomor 02);
41. Peraturan Desa Margamulya Nomor 04 tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) desa Margamulya Tahun 2024 (Lembaran Desa Margamulya Tahun 2022 Nomer 04);
42. Peraturan Desa Margamulya Nomor 07 Tahun 2020 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa MUYA JAYA Desa Margamulya (Lembaran Desa Margamulya Tahun 2020 Nomer 07);
43. Peraturan Desa Margamulya Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah Desa Margamulya (Lembaran Desa Margamulya Tahun 2022 Nomor 01);
44. Peraturan Desa Margamulya Nomor 01 Tahun 2024 tentang Realisasi APBDes tahun 2024 Desa Margamulya (Lembaran Desa Margamulya Tahun 2024 Nomor 01);

mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosiasl; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Margamulya

Ditetapkan di : Margamulya

Pada tanggal : 18 Januari 2024

Kepala Desa,



Diundangkan di : Margamulya

Pada tanggal : 18 Januari 2024

Sekretaris Desa

MAKSUM

LEMBARAN DESA MARGAMULYA NOMOR 02 TAHUN 2024

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA MARGAMULYA
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	75.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.469.977.236,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	383.912,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.545.361.148,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	396.462.672,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	384.490.089,00	
5.3.	Belanja Modal	761.604.458,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	77.400.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.619.957.219,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(74.596.071,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	74.596.071,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	74.596.071,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	74.596.071,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



MARGAMULYA, 18 January 2024

Kepala Desa

DJAMIRI

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA MARGAMULYA
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	75.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.469.977.236,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	383.912,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.545.361.148,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>620.750.016,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	538.536.695,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	61.860.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	61.860.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	196.138.800,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	196.138.800,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	18.203.952,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	18.203.952,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	29.474.481,00	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.474.481,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	34.800.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	34.800.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	8.363.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.863.000,00	
1.1.06	5.3.	Belanja Modal	3.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	53.460.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.460.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	28.091.070,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.091.070,00	
1.1.90		Penyediaan Jaminan Sosial bagi BPD, RT/RW	5.395.392,00	ADD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	709.920,00	
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.685.472,00	
1.1.91		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Hasil pengelolaan Kekayaan Desa	75.000.000,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	75.000.000,00	

DE NING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
2	3	4	5
	Penyediaan Tunjangan Staf Kantor Desa (Non Perangkat)	18.000.000,00	ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
	Penyediaan Tambahan Penghasilan Tetap (Siltap) Ke-13 Bagi Aparatur Desa	9.750.000,00	ADD
5.1.	Belanja Pegawai	9.750.000,00	
	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	28.946.523,00	
	Penyediaan Sarana (Asot Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	7.500.000,00	PBH
5.3.	Belanja Modal	7.500.000,00	
	Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	21.446.523,00	PAD, PBH
5.3.	Belanja Modal	21.446.523,00	
	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	23.266.798,00	
	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1.466.798,00	ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.466.798,00	
	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembung desa Non Reguler)	3.200.000,00	PBH
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.400.000,00	ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.200.000,00	ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	15.000.000,00	ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
	Sub Bidang Pertanahan	30.000.000,00	
	Operasional Penggalan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	30.000.000,00	PBH
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
	<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>860.904.643,00</u>	
	Sub Bidang Pendidikan	14.946.000,00	
	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakailan dll)	14.946.000,00	DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.946.000,00	
	Sub Bidang Kesehatan	116.800.708,00	
	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	22.709.995,00	DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.709.995,00	
	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumi, Lansia, Insentif)	40.775.198,00	DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.775.198,00	
	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	30.000.000,00	DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	5.364.000,00	DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.364.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	17.951.515,00	PAD, PBH
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.951.515,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	604.773.800,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	320.500.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	320.500.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	184.273.800,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	184.273.800,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	224.384.135,00	
2.4.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah **)	224.384.135,00	DDS
2.4.16	5.3.	Belanja Modal	224.384.135,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>53.900.000,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	15.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	15.000.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	5.300.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	5.300.000,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.300.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	33.600.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	28.600.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.600.000,00	
3.4.90		Pelatihan Pembinaan RT/RW, BKM/LKM, KPMD dan Kel. Masyarakat/Kader Desa Lainnya	5.000.000,00	PBP
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>7.002.560,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	3.000.000,00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	3.000.000,00	DDS
4.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	4.002.560,00	
4.4.90		Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, lansia	1.902.560,00	PBH
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.902.560,00	
4.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	2.100.000,00	DDS
4.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>77.400.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	PBH
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	72.400.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	72.400.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	72.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.619.957.219,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(74.596.071,00)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	74.596.071,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	74.596.071,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



MARGAMULYA, 18 January 2024

Kepala Desa